**UPAYA PEMERINTAH DESA PULAU BUSUK JAYA DALAM MENANGGULANGI
PENYEBARAN COVID-19 DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2020**

Oleh: Husri Razak

Pembimbing: Drs. Erman, M.Si

Jurusan Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Effort is an action to solve a problem. This study aims to find out how the Busuk Jaya Island Village Government's Efforts in Overcoming the Spread of Covid-19 in Inuman District Kuantan Singingi Regency in 2021 and to find out the obstacles and obstacles to the Busuk Jaya Village Government in tackling the spread of Covid-19 in inuman District kuantan Singingi Regency in 2021. The theory used is the theory of policy analysis proposed by willian dunn. The method used in this research is descriptive method with qualitative research type. The types of research data are primary data and secondary data. The data analysis technique used is descriptive data analysis. The result of this study are the efforts of the Pulau Busuk Jaya Village Government in Tackling the Spread of Covid-19 in Inuman District Kuantan Singingi Regency in 2021, namely establishing emergency posts, reducing activities outside the home to reduce the spread of Covid-19, for village officials to provide examples to the community where equipment village to comly with health protocols. An appeal to wear a mask when leaving the house, keep your distance, wash your hands, spraying disinfectant. The obstacle to the Busuk Jaya Village Government in tackling the spread of Covid-19, namely the community's disobedience to the government's efforts in realizing the policy to prevent the spread of Covid-19, is the biggest obstacle in implementing efforts to prevent the spread of the Covid-19 virus in Busuk Jaya Island Village. From the efforts of the Village Government to overcome Covid-19, is was able to suppress the spread of the virus, for the positive community. Namely 4 people and there were no more people who were positive for covid-19 virus that spread. Not only the village government but also the surrounding community.

Keywords: Effort, Public Policy, Covid-19

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 Dunia dikejutkan dengan wabah *Corona Virus Disease (covid-19)*. *Corona Virus Disease (covid-19)* merupakan suatu penyakit (virus) yang pertama kali muncul di Negara Cina pada awal Desember 2019. Virus ini sangat cepat menyebar keseluruh Dunia Negara Dunia salah satunya adalah Indonesia. Covid-19 menyebar melalui mulut manusia ketika berbicara dengan orang lain, virus ini dapat menginfeksi setiap orang jika melakukan kontak langsung dengan mereka yang positif Covid-19.

Corona Virus Disease (covid-19) menunjukkan gejala saluran pernapasan yang akan memicu munculnya pneumonia (infeksi saluran pernapasan yang mengenai jaringan paru di paru-paru). Jika tidak menggunakan masker maka akan rentan terinfeksi Covid-19. Gejala awal yang dirasakan bagi yang positif Covid yaitu demam yang disertai dengan batuk kering hingga akhirnya sesak nafas lama kelamaan mengalami gagal nafas (ARDS) pada akhirnya meninggal dunia. Gejala ini sangat cepat terjadi tergantung pada imunitas setiap individunya.

World Health Organization (WHO) sejak Januari 2020 telah menyatakan Dunia masuk kedalam darurat global terkait hal ini. *World Health Organization (WHO)* menetapkan *Corona Virus Disease (covid-19)* diterapkan sebagai pandemi karena telah menyebar hampir diseluruh Dunia. Khususnya di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai dari tanggal 29 Februari 2020. Penyebaran *Corona Virus Disease (covid-19)* semakin hari semakin meningkat maka dari itu pemerintah Indonesia menetapkan *Corona Virus Disease*

(*covid-19*) sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret 2020.

Setelah itu Presiden Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menangani penyebaran Covid-19. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintahan Indonesia yaitu lockdown, PSBB, social dictancing, menutup sekolah/universitas, membatalkan berbagai event, dan lain-lain. Pemerintah sangat berperan penting dalam mengambil kebijakan yang terbaik untuk keselamatan seluruh rakyat. Pemerintah pusat memberi kebijakan atas segala kewenangan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah merilis dua regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP Nomor 21 Tahun 2020) serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Dengan regulasi yang ada, Presiden meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dan tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat lewat Ketua Gugus Tugas. PSBB dapat diusulkan oleh wali kota kepada Menteri Kesehatan dengan pertimbangan Ketua Gugus Tugas, atau dapat diusulkan oleh Ketua Gugus Tugas kepada Menteri Kesehatan. Saat bersamaan, masyarakat juga diminta tetap menjaga jarak aman untuk memutus rantai penularan virus. Menjaga jarak aman antar orang (social distancing) dan membatasi seluruh akses masuk maupun keluar dan dari suatu wilayah dinilai efektif untuk mengendalikan persebaran Covid-19.

Berdasarkan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 yang isinya adalah bahwa penyebaran *Corona Virus Disease (covid-19)* dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara

dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease (covid-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan Tindakan pembatasan sosial berskala besar. Kemudian sosial distancing, menggunakan masker, tidak berkerumunan dan sebagainya upaya pencegahan tersebut tentu melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten hingga desa.

Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Kuantan Singingi, mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penegak hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penngendalian *Corona Virus Disease (covid-19)*. Dalam pelaksanaannya, sejumlah aktivitas masyarakat dibatasi. Antara lain pembatasan aktivitas pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan, kantor, keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat umum dan aktivitas sosial budaya. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, masyarakat harus disiplin di rumah saja, serta menerapkan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Jika terpaksa keluar rumah, warga wajib memakai masker.

Selain dari Kabupaten di Desa juga melakukan beberapa pencegahan Covid-19. Desa merupakan suatu kesatuan, masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah ke anekaragaman partisipasi otonomi asli demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa juga

memiliki perangkat kerja yang mengatur daerah yaitu pemerintahan Desa. Pemerintah Desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 3 menyebutkan bahwa pengaturan kewenangan desa antara lain berasaskan rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul yang dimiliki desa, sedangkan asas subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Berdasarkan UUD tersebut, desa diberi kelonggaran untuk mengurus rumah tangganya dan mengambil keputusan secara lokal. Pemerintahan desa memiliki kewenangan yang luas untuk mengendalikan dan melindungi desanya dengan dorongan dana Desa dan kewenangan otonomi asli Desa, hal ini membuat pemerintahan Desa bisa melaksanakan beragam perintah dari pemerintah wilayah serta pemerintah pusat terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease (covid-19)*.

KERANGKA TEORI

Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan

sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil

yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. ada beberapa bentuk implementasi kebijakan yaitu

- a. Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan akan sekedar impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan.
- b. Implementation Gap yaitu suatu keadaan dimana dalam suatu proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil dari implementasi kebijakan (Andrew Dunsire; Abdul Wahab, 2001).
- c. Implementation Capacity adalah kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan/mengimplementasikan kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai (Abdul Wahab, 2001).
- d. Kegagalan implementasi kebijakan ada dua kategori, yaitu: non implementation (tidak dapat diimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang kurang berhasil).

Adapun kekuatan pemerintah desa dalam upaya penanggulangan covid-19 yaitu mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program yang telah ditetapkan pemerintah. partisipasi dari masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan program tersebut. Adapun kebijakan dari pemerintah desa yaitu social distancing, pembatasan fisik (jaga jarak), penyemprotan disinsfektan mulai dari tempat ibadah, kantor hingga rumah warga. Kebijakan pemerintah desa bagi pasien yang positif corona yaitu mendirikan posko tanggap darurat covid-19, bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala covid sesegera mungkin untuk memberitahu ke perangkat desa.

a. Macam-Macam Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintah untuk menjelaskan proses implementasi.

Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa kalau para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai.

Kenyataan menunjukkan bahwa kebanyakan kebijakan yang dibuat pemerintah tidak pernah sempurna, dan tidak bebas dari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang melengkapinya. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi energy adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.

implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan public yaitu komunikasi (Communications), sumber daya (Resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Keseragaman serta Konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga implementors dapat memahami secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks.

2. Sumberdaya, Komponen sumberdaya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan

program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci.

HASIL PENELITIAN

Upaya Pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya Dalam Menanggulangi Penyebaran Covid-19 Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

1. Komunikasi

Maksud komunikasi dalam penelitian ini yaitu komunikasi kebijakan tentang upaya pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya dalam menanggulangi covid-19, komunikasi disini merupakan penyampaian informasi mulai dari pusat hingga ke desa. Adapun komunikasi pemerintah pusat berupa himbauan kepada seluruh masyarakat agar bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Mulai dari peraturan PSPB Berdasarkan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 yang isinya adalah bahwa penyebaran *Corona Virus Disease (covid-19)* dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan untuk kabupaten pemerintah Kuantan Singingi mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang penerapan disiplin dan penegak hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penngendalian *Corona Virus Disease (covid-19)*.

Sedangkan Pemerintahan Desa Pulau Busuk Jaya tidak ada peraturan tertulis namun Secara tidak langsung Desa Pulau Busuk Jaya juga mengimplementasikan atau menerapkan PP No 21/2020 PSBB seperti selalu memberikan himbauan kepada masyarakat apabila akan melaksanakan hajatan untuk tidak membuat pesta yang besar, tidak membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan, begitupun pengajian.

2. Sumber Daya

Sumber daya disini mencakup sumber daya manusia, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program atau kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program.

Proses implementasi kebijakan komunikasi harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Ada sejumlah kegiatan komunikasi berupa sosialisasi yang bisa tergolong intensif, dengan menggunakan berbagai cara, tetapi hasilnya seringkali tidak berhubungan dengan meningkatnya sebuah kepatuhan. Hal ini meneguhkan pendapat bahwa ada sejumlah faktor lain yang mendorong seseorang itu patuh melaksanakan sebuah

kewajiban yang sudah disadari akan keberadaannya

Berdasarkan dengan wawancara bersaBerdasarkan Wawancara bersama kepala desa beliau mengatakan bahwa:

“setelah dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat sudah mulai mau mengikuti kebijakan pemerintah, masyarakat sudah mulai khawatir dengan covid-19 ini, masyarakat sudah banyak melihat dimedia masa, banyak yang positif corona dengan berbagai gejala mulai dari demam tinggi, sakit tenggorokan, nafsu makan berkurang, indra penciuman tidak bisa mencium bau. Dan masyarakat Didesa Pulau Busuk Jaya pun sudah mulai untuk memakai masker, mengurangi aktivitas diluar rumah.

Dan masyarakat ada yang memiliki gejala-gejala covid-19 seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, namun masyarakat tidak mau memeriksakan diri kedokter, karena mereka takut akan dinyatakan positif corona. Padahal kami pemerintahan desa sudah memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang memiliki gejala-gejala tersebut agar bisa memeriksakan dirinya ke puskesmas setempat, untuk mendapatkan pertolongan”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat sudah mulai pelan pelan untuk mematuhi peraturan dari pemerintah dan bagi masyarakat yang positif covid-19 disedia puskesmas untuk melakukan isolasi bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala covid-19 mereka melakukan isolasi mandiri dirumah sendiri.

3. Disposisi

Meskipun disposisi datang dari dalam diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu. Faktor lainnya adalah adanya insentif bagi pelaksana kebijakan. Tingkat kepatuhan pelaksana dipengaruhi oleh beberapa factor seperti tingkat pengetahuan pelaksana akan kebijakannya serta urgensi dari kebijakan yang dilaksanakan.

4. Struktur Birokrasi

Suatu kebijakan tidak dapat berjalan karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Aspek dalam impelementasi adalah mekanisme biasanya sudah dibuat *Standart Operating Procedure (SOP)*, SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu harus sesuai pada SOP.

Struktur Birokrasi Organisasi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas Organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespon lingkungan. Strategi Organisasi merupakan suatu tindakan hal yang berkaitan dengan model rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern dan strategi tidak mesti berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci dalam prakteknya tidak jarang pengelola Organisasi mengambil keputusan strategi secara bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan dengan Perkembangan Organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap. Implementasi kebijakan yang bersifat

kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak.

Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik

Wawancara dengan kepala desa pulau busuk jaya beliau memaparkan bahwa

“dalam bidang kesehatan kami pemerintah desa melakukan beberapa tindakan mulai dari pencegahan hingga penanganan secara efektif”

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan penjelasan yang lebih rinci yaitu dalam bidang kesehatan pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya melakukan pencegahan melalui yaitu

- a. Pencegahan, Kegiatan promosi kesehatan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pemimpi, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
- b. Kegiatan perlindungan antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19 seperti

berkerumunan, tidak menggunakan masker, merokok ditempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

- c. Penemuan kasus, Deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 dapat dilakukan semua unsur dan kelompok masyarakat melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas) terhadap semua orang yang berada di lokasi kegiatan tertentu seperti tempat kerja, dan fasilitas umum atau kegiatan lainnya.
- d. Penanganan secara cepat dan efektif (respond) Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Penanganan kesehatan masyarakat terkait respond adanya kasus Covid-19 meliputi: Pembatasan fisik dan pembatasan sosial. Pembatasan fisik harus diterapkan oleh setiap individu.

Pembatasan fisik merupakan kegiatan jaga jarak fisik (physical distancing) antara individu, Penerapan etika batuk dan bersin. Menerapkan etika batuk dan bersin meliputi: jika memiliki gejala batuk bersin, pakailah masker medis. Gunakan masker dengan tepat, tidak membuka tutup masker dan tidak menyentuh pembukaan masker. Bila tanpa segaja menyentuh segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan berbasis alcohol

Wawancara dengan kepala desa beliau memaparkan bahwa:

“Pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi lebih waspada

lagi dan tidak menganggap remeh lagi covid-19 ini”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Untuk memberikan pengetahuan yang luas kepada masyarakat maka pemerintahan Desa Pulau Busuk Jaya memberikan sosialisasi pencegahan yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mereka apa bahaya dari corona dan bagaimana cara kita menghindarinya dan lain sebagainya.

Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan agar seluruh masyarakat Desa Pulau Busuk Jaya mau mengikuti himbauan yang telah diberitahuakan kepada mereka, dan pemerinta Desa Pulau Busuk Jaya berharap setelah diadakan sosialisasi ini masyarakat sudah mulai mengikuti protokol kesehatan

Tabel III.1 Rincian dana untuk program pemerintahan Desa Pulau Busuk Jaya dalam menanggulangi Covid-19

No	Jenis kegiatan	Anggaran
1	Pembagian masker	Rp. 2.400.000.00
2	Sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid-19	Rp. 6.616.000.00
	a) Belanja cetak formulir penanganan covid-19	Rp. 1.716.000.00
	b) Honor petugas keliling	Rp. 2.500.000.00
	c) Pengadaan masker 2 box	Rp. 2.400.000.00
3	Penyiapan dan perawatan ruang isolasi	Rp. 18.610.000.00
	a) Pengadaan peralatan dapur	Rp. 1.500.000.00

	b) Pengadaan peralatan mandi	Rp. 500.000.00
	c) Bbm ambulance	Rp. 540.000.00
	d) Sembako pasien dan keuhan pasien covid-19	Rp. 3.520.000.00
	e) Penyediaan vitamin	Rp. 1.500.000.00
	f) Honorarium petugas piket	Rp. 7.050.000.00
	g) Honorarium petugas pengantar pasien	Rp. 600.000.00
	h) Pengadaan peralatan tempat istirahat pasien	Rp. 3.400.000.00
4	Pengadaan alat pencegahan penularan covid-19	Rp. 14.250.000.00
	a) Pengadaan cairan disinfectan 5 liter x14 kemasan	Rp. 2.100.000.00
	b) Pengadaan handsanitizer	Rp. 250.000.00
	c) Pengadaan masker	Rp. 7.600.000.00
	d) Pengadaan wastafel di tiap DKM	Rp. 2.000.000.00
	e) Alat penyemprot	Rp. 1.800.000.00
	f) Tempat cuci tangan	Rp. 500.000.00

Selain itu dibidang ekonomi pemerintah setempat memberikan bantuan. Untuk masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi ini masyarakat diberi bantuan berupa BLT (Bantuan Tunai Langsung) di mana setiap warga yang telah di data oleh ketua RT masing-masing dengan sesuai persyaratan. ditetapkan, perorang mendapatkan 300.000 ribu per bulan dan total dalam 3 bulan mendapatkan Rp. 900.000 ribu. bantuan umkm bagi masyarakat yang membuka usaha, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 2.500.000,

wawancara bersama Ibu Itas selaku masyarakat desa pulau busuk jaya beliau memaparkan bahwa:

“semenjak pandemic ini banyak bantuan yang diberikan pemerintah kepada kami, salah satunya saya yang mendapatkan "bantun BLT, ini sangat membantu perekonomian saya”

Wawancara bersama ibuk Isa selaku masyarakat pulau busuk jaya beliau memaparkan bahwa:

“Bantuan yang saya dapat selama pandemic ini yaitu umkm yang saya gunakan untuk membuka usaha demi membanttu perekonomian keluarga saya”

Dari wawancara diatas, terlihat bahwa ada bantuan yang didapatkan oleh masyarakat selama pandemi. Dengan adanya bantuan ini masyarakat merasa terbantu perekonomiannya.

a. Dampak positif dari kebijakan

Upaya Pemerintah Desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa Pulau Busuk Jaya dalam menyelamatkan masyarakatnya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di mana peneliti jelaskan diatas Pemerintah Desa terus berupaya menekan laju

peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini, salah satunya di bidang ekonomi, sosial sebab keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah desa, namun kerja keras pemerintah desa tidak sia-sia mampu memutus rantai penyebaran Covid-19 di Desa Pulau Busuk Jaya di sisi ekonomi sejak tahun 2020 pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, diantaranya adalah realo/kasi ADD Anggaran Dana Desa yang diarahkan untuk keperluan seperti bantuan tunai BLT Bantuan Tunai Langsung dan juga dari sisi sosial masyarakat yang pada akhirnya mampu menerima aturan seperti menjalankan protokol kesehatan. Adapun dampak positif yang lain dari kebijakan tersebut yaitu melatih masyarakat untuk hidup bersih, saling menjaga satu dengan yang lainnya

b. Dampak negatif dari kebijakan

Dalam dampak negatif dari kebijakan, penulis tidak menemukan karena kebijakan yang diterapkan pemerintah desa kepada masyarakat bisa dijalankan dengan baik, namun dari kebijakan yang dijalankan masih ada masyarakat yang melanggar. Dengan adanya kesadaran dari msyarakat akhirnya terdapat beberapa perkembangan yang berhasil dicapai, ini ditunjukkan dengan hanya 4 orang saja masyarakat desa Pulau Busuk Jaya yang positif corona, dan bagi masyarakat yang mengalami gejala covid sudah sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dari penelitian tentang upaya Pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya

Dalam Menanggulangi Covid-19 Di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2020 sudah efektif, ini terlihat jelas dari usaha pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya sudah berupaya untuk mencegah penularan covid-19 dengan berbagai upaya seperti, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, tidak berkerumunan, mengadakan sosialisasi dan lain sebagainya. Sudah banyak masyarakat yang mau mengikuti himbauan dari pemerintah desa, namun ada juga sebagian yang tidak mau mengikuti protokol kesehatan, bahkan dengan sengaja tidak menggunakan masker. Dan masih ada masyarakat yang berkumpul tanpa menjaga jarak, meski seringkali dihimbau oleh pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kesulitan pemerintah selain sulitnya dalam merepakan protokol kesehatan, namun kesulitan juga dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih peka dalam bahaya nya virus yang menyerang kita.

Pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya tetap memberikan peringatan kepada mereka agar mereka mau mengikuti protokol kesehatan. Disini dapat simpulkan bahwa antara pemerintah dengan masyarakat harus saling bergandengan dalam mengurangi resiko penyebaran virus covid-19, masyarakat dan pemerintah harus sama-sama menumbuhkan rasa sadar diri dan tanggung jawab dalam memutuskan rantai penyebaran covid.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas bahwa keberhasilan upaya pemerintah dalam merealisasikan kebijakan pemerintah desa Pulau Busuk Jaya mengenai penanggulangan penyebaran Covid-19 tidak lepas dari tingginya partisipasi para

pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat, sebagaimana masyarakat sendiri lah menjadi subyek utama yang diuntungkan dalam kebijakan pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya. Masyarakat harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga penilaian. Upaya pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya dalam menanggulangi penyebaran covid-19 ini sudah efektif, sampai saat ini berjalan karena masyarakat sudah mulai mau mengikuti kebijakan dari pemerintah.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Desa Pulau Busuk Jaya untuk meminimalisir penyebaran covid-19 yaitu:

1. mendirikan posko darurat
2. mengurangi aktifitas diluar rumah untuk mengurangi penyebaran covid-19
3. bagi perangkat desa memeberikan contoh kepada masyarakat dimana perangkat desa untuk ikut mematuhi protokol kesehatan.
4. himbauan memakai masker saat keluar rumah
5. Menjaga jarak atau mengurangi aktiviitas diluar rumah kegiatan didesa ataupun melakukan komunikasi antar warga.
6. Mencuci tangan merupakan salah satu bentuk menekan angka covid-19 adalah dengan menerapkan wajib cuci tangan sebab cuci tangan merupakan salah satu pola hidup sehat.
7. Melakukan penyemprotan disinfektan, pemerintahan desa melakukan penyemprotan disinsfektan pada setiap rumah, masjid, kantor dan fasilitas umum

Kemudian faktor penghambat pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan yakni ketidakpatuhan masyarakat terhadap upaya pemerintah

dalam merealisasikan kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi kendala terbesar dalam pelaksanaan upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Desa Pulau Busuk Jaya.

Saran

Bagi masyarakat diharapkan semua masyarakat desa Pulau Busuk Jaya mampu melakukan arahan yang diberikan oleh pemerintah desa, karna kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk bela Negara dalam menghadapi pandemi Covid-19, sehingga peran aktif masyarakat dalam menangkal pandemi Covid-19 dapat membuahkan hasil yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Public*. Jakarta : Pt Bumi Aksara. H.8-9.
- Andreas Delpiero Roring, Michael S. Mantiri, Marlien T. Lopian. 2021. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan* JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 2.
- Awan Y. Abdoellah. Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta. H. 75-76.
- Bungi Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Prenada Group. H. 111.
- Dyah Mutiara, Arif Zaenudin.2014. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pusataka Belajar. Hlm.19
- Edi Suharo, Ph.D. 2014. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Social*. Cv.Alfabeta:Bandung, H. 84-85.
- Wandi Sustiyo. *Journal Of Physical Education, Sport, Healt And Reacreations*. Universitas Negeri Semarang. 2013. H. 527.
- Nurcholis Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta. H.73.
- Unddin B.Sore, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar :CV SAH MEDIA. Hlm 119- 128
- Raharjo. 2011. *Sosiologi Perdesaan*. Universitas Terbuka. H:6-9
- Rahman Taufiq. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers. Hlm 4-5.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 2016. Bandung: Alfabeta
- Suharo Edi. 2014 *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Cv. Alfabeta: Bandung. H. 44.
- Sumber: *Dokumen Kantor Kepala Desa Pulau Busuk Jaya*, 01 Desember 2021
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2008. Hal 1784.
- UU No 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa.
- Wandi Sustiyo. 2013. *Journal Of Physical Education, Sport, Healt And Reacreations*. Universitas Negeri Semarang.H. 527.

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada. H.3

PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid- 19

Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegak Hukup Protocol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penngendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)*

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 3 Menyebutkan Bahwa Pengaturan Kewenangan Desa

Sumber :Program Pemerintahan Desa Pulau Busuk Jaya Dalam Menanggulangi Covid-19

Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18